

**EVALUASI PENGGUNAAN APLIKASI SISKUDES DALAM UPAYA
PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS
KEUANGAN DESA**

(Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Akuntansi (S1) Jurusan
Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh :

Reski Amalia Putri

NIM : 10800113012

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2018



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata - Gowa Tlp. 424835 Fax 424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa)", yang disusun oleh Reski Amalia Putri, NIM: 10800113012, mahasiswa Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 19 Maret 2018 M, bertepatan dengan 6 Rajab 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ekonomi, Jurusan Akuntansi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 19 Maret 2018 M.
06 Rajab 1439 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.	(.....)
Penguji II	: Memen Suwandi, SE., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Mustakim Muchlis, SE., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Sapril Sardi Juardi, SE., M.SA., Ak., CA.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur atas izin perkenaan Allah SWT sehingga skripsi yang berjudul: **EVALUASI PENGGUNAAN APLIKASI SISKUDES DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa)** dapat penulis selesaikan. Begitu juga, salam dan taslim semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan ummatnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh Karen itu tidak menuntut kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini disusun dengan mengutamakan pendekatan secara inkuir (*eksperimen*) dan disajikan secara sistematis, komunikatif, integratif, dan inovatif serta adanya keruntutan rangkaian. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai dengan pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Untuk menumbuhkan daya nalar, kreativitas, dan pola berpikir matematis, kami sajikan aktivitas yang menuntut peran aktif mahasiswa dalam melakukan kegiatan tersebut. Selama penyusunan skripsi ini, tidak dapat lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si.**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan study Strata (S1) di salah satu universitas islam di Makassar, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak **Jamaluddin Majid, S.E., M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Bapak **Memen Suwandi, S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. Bapak **Mustakim Muchlis, S.E., M.Si., Ak.** sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Muh. Sapril Sardi Juardi S.E., M.SA., Ak., CA.** selaku dosen pembimbing II, dan juga mentor dalam berbagai hal bagi penulis, yang telah mendorong, membantu, dan mengarahkan penulis hingga penyelesain skripsi ini.
7. Segenap dosen serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Bapak Asrul S.T selaku Kepala Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian kepada Pak Alam, dan Pak Taslim.

9. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Sudirman dan Ibunda Salyuni yang telah mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti, yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya. Maafkan jika ananda sering menyusahkan, merepotkan serta melukai Ibunda Dan Ayahanda. Keselamatan dunia akhirat semoga selalu untukmu. Semoga Allah SWT memberkatimu dengan rahmat-Nya.
10. Kekasihku yang tercinta Harnadi S.Ak sekaligus Partnertku yang telah memberikan dukungan dalam proses pengerjaan skripsi dan dorongan untuk tetap semangat dan sabar meskipun terkadang dia sedikit menjengkelkan tetapi makasih untuk pengertian dan kesabarannya.
11. Teman-teman kelas, Akuntansi A 2013 yang selalu menjadi teman sekelas selama kurang lebih empat tahun semasa kuliah di UIN Alauddin Makassar.
12. Teman-teman angkatan 2013 Akuntansi yang telah meluangkan waktu serta kerelaannya menjadi teman seangkatanku selama di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
13. Para sahabat-sahabat yang selalu menampung keluhan dan memberi semangat. Khususnya Nurul Muhalisa (Nulis), Arnita (Nonet), Nurhalisa Sari Rahman (Baga), dan Rahmat (Golok).
14. Semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut memberikan bantuan, semangat dan pengertian secara tulus.

Semoga skripsi ini bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Negara yang kita cintai ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua

pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini. Sebagai hamba yang penuh keterbatasan, kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, segala kerendahan hati kami membuka diri atas saran dan kritikan dari pembaca yang budiman untuk penyempurnaan skripsi berikutnya. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh

Makassar, Maret 2018

Reski Amalia Putri
NIM. 10800113012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-12
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	11
BABA II TINJAUAN TEORITIS.....	13-32
A. Compliance Theory.....	13
B. Evaluasi.....	15
C. Akuntabilitas	16
D. Sistem.....	18
E. Keuangan Desa.....	19
F. Desa.....	25
G. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKUDES).	29
H. Rerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN..	33-42
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.	33
B. Pendekatan Penelitian.	33

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian	34
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Instrument Penelitian.....	37
F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data	37
G. Pengujian Keabsahan Data.....	41
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44-77
A. Gambaran Lokasi Penelitian	44
B. Gambaran Informan	50
C. Pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Desa Jennetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.....	51
D. Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Setelah Penerapan Aplikasi (SISKEUDES).....	65
E. Theory Kepatuhan Dalam Aplikasi Sisktem Keuangan Desa.....	73
F. Perpektif Islam Tentang Akuntabilitas.....	77
BAB V PENUTUP	81-83
A Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	84-87
LAMPIRAN.....	88-99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Desa.....	28
Gambar 2.2 Skema Rerangka Pikir.....	32
Gambar 4.3 Skema Struktur Organisasi Desa.....	47
Gam bar 4.4 Skema Struktur Keuangan Desa	55



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	3
Tabel 4.2 Distribusi Jumlah Sarana Pendidikan	4
Tabel 4.3 Distribusi Jumlah Sarana Kesehatan.....	4
Tabel 4.4 Informan Desa Jenetallasa	5



ABSTRAK

Nama : Reski Amalia Putri

NIM : 10800113012

Judul : Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa pada Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Sistem Keuangan Desa yang di mulai dari modul perencanaan, modul penganggaran, modul penatausahaan dan modul pertanggungjawaban keuangan desa.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *paradigma interpretative*. Data diperoleh dengan obsevasi dan wawancara secara mendalam, kemudian diproses tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan, Keabsahan data dilakukan dengan uji credibility, triangulasi sumber data, triangulasi teori dan uji transferability.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Jenetallasa dalam melakukan penerapan Aplikasi SISKEUDES telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses pengimputan dan pelaporanya di Desa Jenetallsa sudah mekalukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik. Desa Jenetallasa telah menerapkan prinsip patuh dan taat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta bersikap adil dalam menyampaikan informasi sehingga semua proses pengerjaan sudah terstruktur dengan baik yang kemudian penerapan aplikasi siskeudes dapat menghasilkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dalam mewujudkan tata kelolah desa yang baik.

Kata Kunci: *Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Good Governance, Akuntabilitas,*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah, suatu daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan kabupaten dan kota. Otonomi daerah merupakan konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang sangat berbeda-beda semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Yunianti, 2015).

Desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Dewanti, 2015), desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum, sehingga desa memiliki kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berkaitan dengan peran tersebut, diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan. Dengan adanya kewenangan yang diberikan ke pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju mandiri dan demokratis. Pada tataran tersebut desa sudah sejak lahirnya adalah suatu wilayah atau tempat yang memiliki sifat otonom dan selalu akan menjadi dinamis (Susetiwana, 2011).

Isu tentang desa merupakan salah satu isu pembangunan yang menarik banyak pihak dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Jokowi memposisikan desa sebagai target utama pembangunan yang tertuang dalam Nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan sehingga desa menjadi salah satu bagian dari Kementerian desa, transmigrasi dan daerah tertinggal (Sulistiyowati, 2017). Keberpihakan pemerintah terhadap desa sudah dimulai sejak munculnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan pemerintahan Jokowi memiliki tekad untuk melaksanakan mandat dari UU desa tersebut.

Kebijakan yang dilakukan untuk mendukung kemandirian desa adalah salah satunya dengan memberikan keleluasaan desa untuk mendapatkan pembiayaan langsung dari APBN tidak lain dalam rangka untuk mencari bentuk dan format ideal yang bisa menempatkan posisi desa sebagai suatu daerah yang memiliki sifat istimewa dan kejelasan status serta kepastian hukumnya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (Faozi 2015). Lebih lanjut pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri NO. 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Ditetapkannya pedoman umum dalam tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa yakni memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan. Dengan itu maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2014 tentang Perencanaan Desa yaitu pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBDesa semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Akan tetapi keuangan desa merupakan hal yang strategis bagi desa maupun bagi pemerintahan, apa yang terjadi di desa sebenarnya menunjukan bagaimana pola keuangan di desa yang dilakukan oleh perangkat desa yang mana perencanaanya harus disusun dengan bersama masyarakat desa karena

dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Fenomena global adanya tuntutan demokrasi dengan mengedepankan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas pada bidang pemerintahan dan politik, termasuk bidang pengelolaan keuangan merupakan konsekuensi yang perlu disikapi dalam memasuki paradigma otonomi. Hal tersebut berimplikasi terhadap perubahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih mengedepankan pendekatan regional, di mana pemerintah desa menjadi faktor dinamis dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan dan kemasyarakatan. Kemudian kondisi aparatur pemerintah daerah saat ini kemampuannya masih rendah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah (Sidik, 2002). Pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama (Subroto, 2009). Kapasitas sumber daya manusia di desa selama ini kurang merata (Yuliana, 2013). Dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP, 2015). Hal itu terjadi karena pemerintahan desa akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan mengevaluasi standar yang digunakan dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban keuangan desa. Proses perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi apakah pemerintahan desa melakukan tugasnya secara efektif dan efisien, dengan melakukan hal yang benar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Moedarlis, 2016). Berdasarkan firman Allah dalam Al-quran surah Al-furqan ayat (25:59).

الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهٖ خَيْرًا ۝ ٥٩

Terjemahnya:

“Dia yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Dalam enam hari, dan ditetapkan dengan teguh di Arasy (otoritas): Allah Yang Maha Pemurah lagi: Maka bertanya kepada-Mu tentang orang yang berkenalan (Q.S. Al-furqan/25:59).”

Enam hari yang disebutkan dia atas merupakan ungkapan Allah tentang masa, sistem alam ini yang rinci dan sempurna serta mencakup segala sesuatu, penguasaan Allah dan sistem yang ada di dalamnya untuk mengetahui kekuasaan rahasia-rahasia Allah dalam penciptaan. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam proses penciptaan langit dan bumi, Allah susun secara baik dan benar sehingga dapat memberikan dampak positif bagi penghuninya yang termasuk didalamnya adalah manusia dan makhluk hidup lainnya, begitupula dengan aplikasi sistem keuangan desa yang telah di terapkan oleh pemerintah desa atau aparatur desa haruslah di kelolah dengan baik agar dapat menghasilkan informasi yang lebih relevan dan output yang berguna bagi pemerintah dan masyarakat.

Desa Jenetallasa merupakan desa yang terbentuk dari pemekaran desa dari desa kanjilo. Jene yang artinya air dan tallasa berawal dari adanya mata air yang tidak pernah kering walau saat musim kemarau dan sekarang mata air tersebut dijadikan sumur dan sampai sekarang walau musim kemarau panjang disaat semua sumur warga disekitarnya kering tapi sumur jenetallasa tidak pernah kering airnya sampai saat ini. Desa Jenetallasa penduduknya kedua paling padat di Kabupaten Gowa karena banyaknya perumahan-perumahan warga yang menjadikan Desa Jenetallasa tempat yang aman nyaman dan bersahabat. dari desa ini juga salah satu dijadikan jalan alternatif terbaik untuk menuju kota Gowa dan Makassar. Kemudian dalam hal keuangan desa, Sistem keuangan desa memberikan ruang bagi instansi pemerintah desa untuk mendapatkan informasi lebih luas dan mendorong mereka untuk berperan dalam menyampaikan informasi. Sistem ini akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan penyusunan program desa, dengan semakin berat dan kompleksnya tugas pemerintah desa yang terjadi pada Desa Jenetallasa, sistem informasi dan komunikasi menjadi pendukung desa dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transparan, kredibel dan mempermudah partisipasi masyarakat sehingga pada proses pengelolaan siskeudes di Desa Jenetallasa harus lebih diperhatikan. di Desa Jenetallasa telah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dalam aplikasi tersebut terbagi atas 4 (empat) modul akan tetapi dalam hal penerapannya belum diketahui apakah di desa tersebut telah menerapkan ke 4 modul tersebut maka dari itu akan di evaluasi mengenai penerapan aplikasi siskeudes di Desa Jenetallasa.

Terbangunnya sistem yang baik dalam mengelola keuangan desa diharapkan pemerintah desa akan mampu mandiri dalam menjalankan ke pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat, melihat dari beberapa masalah tersebut tentu saja dalam hal ini masih ada indikasi atau potensi yang masih bisa ditemukan dalam proses akuntabilitas keuangan di desa. Maka dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan desa yang akuntabel melalui penelitian ini, maka peneliti berupaya untuk mendapatkan informasi lebih dalam untuk mengetahui penggunaan sistem keuangan desa dengan upaya peningkatan akuntabilitas keuangan di Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Adapun fokus penelitian ini adalah agar ruang lingkup peneliti tidak luas dan lebih fokus untuk menghindari kesalahan sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti memfokuskan hanya pada penggunaan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Penelitian ini melakukan observasi dan wawancara kepada informan dengan secara mendalam yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi tentang bagaimana penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam mencapai kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Jenetallasa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa?
2. Bagaimana kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah penerapan aplikasi (SISKEUDES)?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dalam upaya peningkatan tata kelola keuangan desa:

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Jenetallasa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa.
2. Untuk mengetahui kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah penerapan aplikasi (SISKEUDES).

E. Kajian Pustaka

Dasar atau acuan yang berupa temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah:

Table 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Muhammad Ismail, Ari Kuncoro Widagdo dan Agus Widodo (2016)	Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113/2015. Hal ini ditambah lagi dengan belum adanya tenaga pendamping dari Kabupaten Boyolali untuk membantu pengelolaan dana desa.
Fajar Trilaksanan Moedarlis (2016)	Sistem akuntabilitas keuangan desa	Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentang akuntabilitas keuangan desa di desa temuwuh dan terong yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa sistem akuntabilitas di Pemerintah desa Terong telah akuntabel di dalam pengelolaan keuangan desa sedangkan desa temuwuh sendiri belum akuntabel, bahwa dalam perumusan keuangan dan pembangunan desa, ditenggarai hanya oleh Pemerintah desa itu sendiri karena hasil dari Musrembang dan Mudes yang telah di sepakati dirubah kembali namun perubahan tersebut tidak sesuai dengan kehendak BPD dan elemen masyarakat yang telah terlibat.
Elsa Dewi Wahyu Dewanti, Sudarno, Taufiq Kurrohman	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di	Hasil penelitian ini adalah perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Boreng dan analisis kesesuaian antara perencanaan

(2016)	Desa Boreng	pengelolaan keuangan desa dan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007. Hasil analisis tersebut kemudian di bandingkan dengan hasil wawancara dengan kepala desa menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa dengan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007
Umi Yulianti (2015)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	Berdasarkan hasil analisis data terhadap efisiensi dan efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa Argodadi tahun anggaran 2010-2013, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kinerja keuangan tahun 2010-2013 memiliki kecenderungan tidak efisien, sedang pada tahun 2013 pada kriteria kurang efisien. Dan secara keseluruhan kinerja keuangan tidak efisien dan dengan rata-rata tingkat efisien diatas 100% yaitu sebesar 103,12%. Dan efektivitas kinerja keuangan tahun 2010-2013 memiliki kecenderungan sangat efektif yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 123,75%.
Muhammad Zainul Abadin (2015)	Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keuangan desa telah didasarkan pada Permendagri No. 6 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan. Selama 2010-2013, pelaksanaan keuangan desa menunjukkan perbaikan dari sisi tertib pelaksanaan administrasi keuangan desa disebabkan, antara lain, kurangnya keberadaan dan kapasitas perangkat desa serta kemandirian desa.

Penelitian mengenai penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKUDES) yang masih kurang meneliti tentang aplikasi keuangan desa, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian kali ini obyek penelitian berfokus pada Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallanga, Kabupaten Gowa. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan evaluasi penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKUDES) yang berdasarkan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa yang mengenai aplikasi sistem keuangan. Sedangkan persamaannya adalah menekankan pada sistem dan keuangan desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoretis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Untuk memberikan wawasan yang luas bagi para akademisi dimana dapat mengetahui penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKUDES) dengan baik dan dapat memberikan kontribusi besar, sehingga kita tahu bahwa ilmu merupakan pedoman kita dalam melakukan kegiatan yang lebih baik. Selain itu, diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan pengembangan konsep terhadap pemberian kebijakan, sehingga dalam penggunaannya tidak adanya perbedaan pandangan antara pemerintah pusat, daerah, desa, dan juga masyarakat.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi instansi yang bersangkutan

Hasil penelitian ini sebagai masukan kepada pemerintah Kabupaten Gowa khususnya Kecamatan Pallangga, Desa Jenetallasa dalam penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES).



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Theory Compliance* (Teori Kepatuhan)

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan didalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan perpektif normatif maka seharusnya teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi (Rosalina, 2010). Kepatuhan berasal dari kata yang patuh, yang menurut kamus bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, dan patuh pada ajaran dan peraturan.

Komitmen moralitas melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusunan hukum tersebut memiliki aturan untuk melihat perilaku (Septiani, 2005). Berdasarkan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, yang secara garis besar pedoman pengelolaan Desa meliputi asas pengelolaan keuangan Desa, kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, struktur APBDesa, penyusunan rancangan APBDesa, perubahan APBDesa, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa, pelaksanaan

APBDesa, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pembinaan dan pengawasan dalam mengelola keuangan Desa.

Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan yang semakin berat dan kompleksnya tugas pemerintah Desa, maka kepala Desa dan perangkat Desa semakin dituntut memberikan hasil terbaik dalam menjalankan tugasnya. Dengan terbaiknya sistem yang baik dalam mengelola keuangan desa diharapkan pemerintah desa mampu mandiri dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundanga-undangan yang berlaku serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa (4): 80.

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ ٨٠

Terjemahnya

“Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul” taatlah kepada Allah dan taat Rasul”, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya.”. “barangsiapa yang menaati rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah.” (Q.S. An-Nisa [4]:80)”.

Ayat diatas mengajak manusia untuk menaati Allah SWT dan Rasul-Nya. Di samping itu ayat ini menyeruh seluruh manusia khususnya orang-orang yang beriman untuk menaati Allah SWT dan Rasulullah SAW. Ketaatan kepada Allah bermakna mengamalkan hukum-hukum agama yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Terkait dengan syariat dan hukum-hukum, ketaatan kepada Rasulullah SAW adalah bermakna ketaatan kepada Allah SWT. Turunnya ayat ini mengajarkan kepada kaum muslimin agar menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh atasannya sendiri.

Begitupun pada pemerintah desa wajib mematuhi peraturan-peraturan yang telah diterapkan pada pemerintah desa.

Aparatur pemerintah desa berikan tugas, tanggung jawab, wewenang serta mencakup status dan peran yang dimiliki, maka aparatur pemerintah Desa tersebut harus patuh dalam menjalankan tugasnya dengan amanah dan memiliki rasa tanggung jawab, struktur organisasi yang bisa berjalan dengan mengikuti aturan serta terbuka dalam menerima kritik dan saran akan membuat pemerintah lebih maju dalam tercapainya tujuan organisasi. Teori kepatuhan dapat membuat seseorang atau organisasi lebih patuh pada peraturan yang berlaku sama seperti pemerintah desa yang berusaha tepat waktu dalam penyampaian laporan karena merupakan suatu kewajiban dan karakteristik dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Diberikannya tugas, tanggungjawab, wewenang serta mencakup status dan peran yang dimiliki, maka aparatur pemerintah desa tersebut harus patuh dalam menjalankan tugasnya dengan amanah dan memiliki rasa tanggung jawab.

B. *Evaluasi*

Proses dalam melakukan evaluasi keuangan mungkin saja berbeda sesuai persepsi teori yang dianut, ada bermacam-macam cara antara lain menurut (Arikunto, 2006) Evaluasi yakni mengukur dan menilai, kita tidak dapat mengadakan penilaian sebelum kita mengadakan pengukuran. (Purwanto, 2008) menyatakan dalam arti luas evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Evaluasi keputusan teoritis (*formal decision-theoretic evaluation*) adalah pendekatan yang

menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Menurut (Tayibnapis, 2000) menyatakan pendapat tentang fungsi evaluasi, yaitu fungsi evaluasi yaitu memfokuskan evaluasi, mendesain evaluasi, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, melaporkan hasil evaluasi, mengelola evaluasi, mengevaluasi evaluasi.

Menurut (Dunn, 2000) menyatakan mengenai evaluasi yaitu Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalam melaksanakan evaluasi keuangan desa harus diadakan suatu proses terlebih dahulu yaitu mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, melaporkan hasil evaluasi, mengelola evaluasi, mengevaluasi evaluasi untuk menentukan tujuan dan target yang hendak dicapai.

C. Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. (Anwar 2013) menyatakan Akuntabilitas atau pertanggungjawaban

(account-tability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Taufik 2013). Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan 38 dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

D. Sistem

Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang sistem antara lain, menurut (Kantaprawira, 1999: 3) menyatakan mengenai sistem yaitu Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang lebih tinggi daripada hanya merupakan cara, tata, rencana, skema, prosedur, atau metode. Kemudian menurut (Mamesah, 1995:5) menyatakan bahwa sistem adalah sebagai kebulatan yang berliku-liku dan tetap dari hal-hal atau unsur-unsur yang saling berhubungan dan disatu padukan berdasarkan sesuatu asas tata tertib. Selanjutnya menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan bahwa sistem sebagai suatu totalitas yang terdiri dari sub sistem dengan atribut-atributnya yang satu sama lain berkaitan, saling ketergantungan satu sama lain, saling berinteraksi dan saling pengaruh mempengaruhi sehingga keseluruhannya merupakan suatu kebulatan yang utuh serta mempunyai peranan dan tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, bahwa dalam melaksanakan sistem keuangan desa harus saling berinteraksi dan saling pengaruh satu sama lain dan merupakan satu unsur atau elemen yang saling berhubungan. Administrasi keuangan memiliki arti, manfaat dan pengaruh yang begitu besar terhadap nasib suatu bangsa. Segala kebijakan yang ditempuh di bidang administrasi keuangan bisa berakibat kemakmuran atau kemunduran serta kejayaan suatu bangsa. Kepandaian mengendalikan negara dibarengi dengan kepandaian mengendalikan keuangan akan memberi hasil yang memuaskan sesuai yang diharapkan. Sebaliknya tanpa

mengendalikan keuangan dengan baik serta kurang mampu melihat kedepan dapat berakibat suatu kehancuran. Hal ini dapat berlaku bagi administrasi keuangan di daerah otonom.

E. *Keuangan Desa*

Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa yang di maksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sedangkan yang di maksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang di mulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Aspek perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana

Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Aspek penganggaran, diarahkan agar seluruh proses penyusunan APB Desa dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam menetapkan arah kebijakan umum berdasarkan skala prioritas serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Melalui arah kebijakan perencanaan anggaran yang skala prioritas dan pelibatan partisipasi masyarakat desa ini berarti memberi makna bahwa setiap penyelenggaraan di desa berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya. Proses penganggaran merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi apakah pemerintahan desa melakukan tugasnya secara efektif dan efisien, dengan melakukan hal yang benar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

1. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
2. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan mengenai hasil Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan

Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan

Aspek pelaksanaan dan penatausahaan Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

1. Buku Kas Umum.
2. Buku Kas Pembantu Pajak
3. Buku Bank

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan. keuangan desa, bahwa pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah kepala

desa, selanjutnya dalam pelaksanaannya kepala desa dibantu oleh bendaharawan desa, perangkat desa beserta masyarakat.

Aspek pertanggungjawaban keuangan desa, bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas dan transparan maka kepala desa sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan keuangan desa wajib menyampaikan pertanggung jawabannya kepada bupati/walikota melalui camat. Melalui pengaturan beberapa aspek tersebut diharapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa secara rinci dapat ditetapkan di setiap desa, sehingga mendorong desa menjadi lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif menuju efisiensi. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodic semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilampiri:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan.
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Berikut merupakan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan untuk mewujudkan opertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

F. Desa

Desentralisasi desa telah menawarkan kepada kita tentang kesadaran bagaimana kedepan dalam membangun desa. Di desa bisa dijiwai dan bias mengakomodir nilai-nilai lokal, kultural dan sejarahnya. Pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan sumberdaya daerahnya dengan sebaik mungkin. Sumber daya yang sesungguhnya, sebenarnya ada pada desa bukan di level atasnya sehingga desa mempunyai peranan yang sangat penting bagi kemajuan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa yang di maksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai masyarakat hukum artinya kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan Desa bertujuan:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 juga mengatur penataan desa. Penataan desa bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

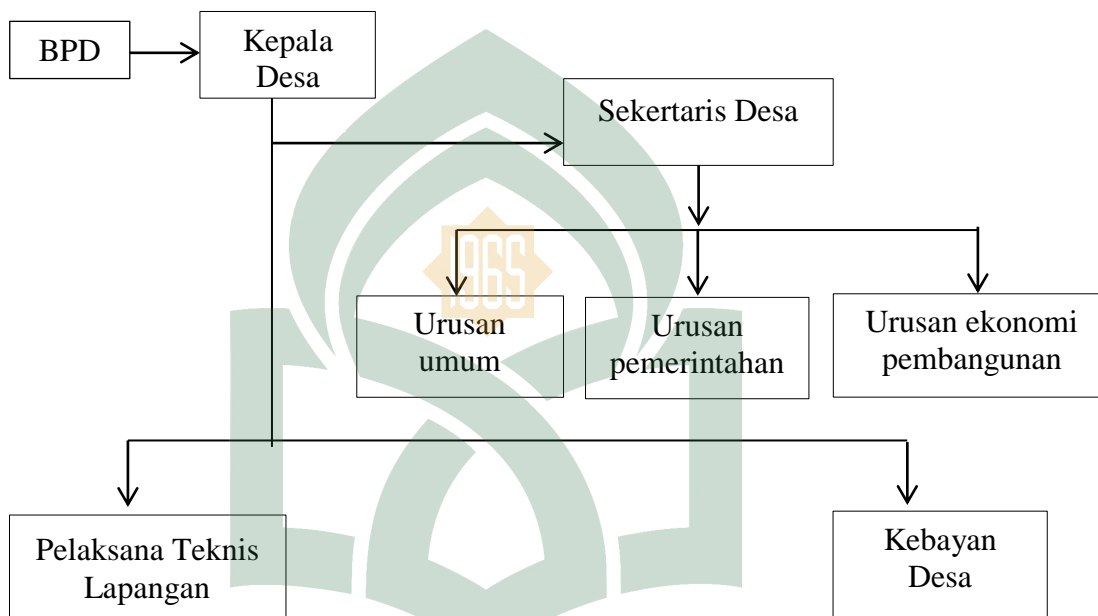
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 juga mengatur penataan desa. Penataan desa bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan meningkatkan daya saing desa. *Corporate Governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Desa dinyatakan tentang pemerintahan desa, yaitu Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, sangat jelas bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek penghidupan desa, baik dalam bidang pelayanan (*public servis*), pengaturan (*public regulation*) dan pemberdayaan masyarakat (*public empowerment*). Pola organisasi pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

menggunakan 2 pola yaitu pola minimal dan pola maksimal. Berikut dapat digambarkan bagan organisasi pemerintahan desa yaitu:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Desa



Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa. PTPKD adalah perangkat desa yang di tunjuk oleh kepala desa untuk

melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri dari sekretaris desa, kaur keuangan maupun kaur umum.

G. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Pengembangan Aplikasi Sistem Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015.

Aplikasi ini telah diimplementasikan secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan *Quality Assurance* (QA) oleh Tim yang telah ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang

dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES.

Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Dokumen Penatausahaan.
- 2) Bukti Penerimaan.
- 3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- 4) Surat Setoran Pajak (SSP).
- 5) Dan dokumen-dokumen lainnya.
- 6) Laporan-laporan. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana).
- 7) Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register).

Kemudian dari aplikasi tersebut terdapat beberapa kelebihan aplikasi SISKEUDES yang antara lain adalah:

1. Sesuai Peraturan
2. Memudahkan Tatakelola Keuangan Desa
3. Kemudahan Penggunaan Aplikasi
4. Dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (Built-in Internal Control)

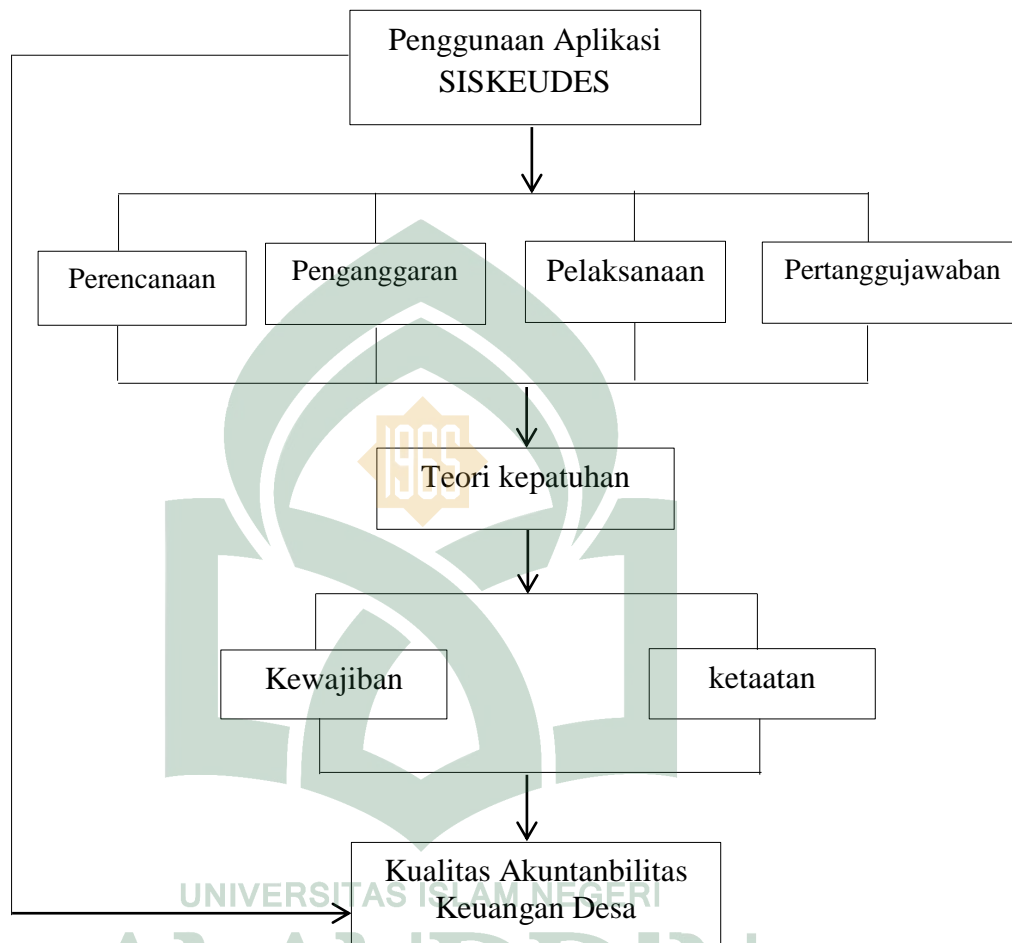
5. Didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi.

H. *Rerangka Pikir*

Kepatuhan berasal dari kata yang patuh, yang menurut kamus bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin, Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, dan patuh pada ajaran dan peraturan, Komitmen moralitas melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusunan hukum tersebut memiliki aturan untuk melihat perilaku. Dari penjelasan di atas, secara sederhana kerangka pikir dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



Gambar 2.2
Skema Rerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman terhadap realitas sosial. Menurut (Rahmat, 2009), penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dengan kata lain, Penelitian kualitatif lebih memungkinkan untuk mengupas problematika secara lebih jelas karena penelitian dilakukan secara lebih mendalam dan secara langsung terhadap objek yang diteliti dan bukan dalam bentuk statistik dengan pengukuran sesuatu seperti halnya pada penelitian kuantitatif yang berfokus pada angka-angka dan penilaian sistem. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jenetallasa, Jenetallasa adalah salah satu desa yang berada di Kawasan Indonesia timur yang menempati lokasi Kec. Pallangga Kab. Gowa.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dengan keadaan subjek atau objek dalam penelitian berupa orang, lembaga, masyarakat dan lain-lain yang saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran,

ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 1988). Sehingga peneliti akan mengkaji secara mendalam mendikripsikan, menguraikan, dan menjelaskan tentang evaluasi penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKUDES) dapat mengimplementasikan kualitas akuntabilitas keuangan desa. Paradigma interpretatif ini dianggap lebih tepat karena sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek (*self-report data*) yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan data dokumenter (*documentary data*). Selain itu jenis data yang digunakan juga adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang berbentuk informasi, gambaran umum desa, pelaksanaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.

Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa kata-kata, tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang diteliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data. Selain itu data primer juga merupakan pandangan sikap, atau persepsi pelaku aplikasi sistem keuangan desa. Ada pun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini akan digunakan semaksimal mungkin demi mendorong keberhasilan penelitian ini.

Penelitian ini istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah *informan*. penelitian ini memandang representasi informan terwakili oleh kualitas informasi yang diberikan oleh informan bukan jumlah informan yang dilibatkan dalam

penelitian ini. Informan penelitian tersebut di atas dipandang cukup cakap dan layak untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Sekertaris Desa (Pak Alam)
2. Sekertaris Desa (Pak Taslim)

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam, yang dibantu dengan alat perekam (*tape recorder*). Alat perekam ini berguna sebagai bahan *crosscheck*, jika pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewawancara:

1. Observasi

Menurut (Arikunto, 2010), observasi atau yang disebut pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dan menggunakan seluruh alat indra. Sedangkan menurut (Tanzeh, 2011) observasi sebagai alat mengumpulkan data yang banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian dengan tujuan mengevaluasi aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang dilakukan oleh Desa Jenetallasa.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apa bila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri ataus *elf – report* atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Untuk wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan. Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.

3. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.

4. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan evaluasi aplikasi sistem keuangan desa (SISKUDES) yang dilakukan oleh Desa Jenetallasa.

5. *Internet searching*

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi

penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan masalah yang diteliti.

E. *Instrument Penelitian*

Instrument penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. *Handphone*
2. Daftar pertanyaan wawancara.

F. *Tehnik Pengolahan dan Analisis Data*

Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Untuk memperoleh data digunakan teknik-teknik pengumpulan data studi dokumen/kepastakaan dan wawancara yang dilakukan secara terarah dan mendalam. Menurut *Miles dan Huberman* proses pengelolaan data dan analisis data dalam penelitian dilakukan melalui tiga tahap, yang meliputi tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan/verifikasi data. Langkah tersebut dapat dijelaskan ke dalam tiga tahap berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyerdehanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncu dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam reduksi data dapat dilakukan dengan jalan

memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diajukan pada rumusan masalah. Dan data yang relevan atau sesuai dengan menganalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan atau kurang sesuai disisihkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang dilakukan peneliti ada dua tahapan penyajian, yaitu tahap deskriptif dan tahap evaluatif/kritik.

a) Tahap deskriptif

dimulai dengan mengidentifikasi data dari hasil reduksi data yang dilakukan sebelumnya, dilanjutkan dengan menjelaskan data yang memiliki hubungan dengan nilai-nilai sosial dan diakhiri dengan merumuskan alat analisis yang digunakan untuk menganalisa objek kritik.

b) Tahap evaluasi/kritik

ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi pengguna aplikasi sistem keuangan desa (SISKUDES) dengan tujuan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa.

c) Penarikan kesimpulan

Pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini. Penentuan

sampel dipilih secara *purposive-sampling*, yaitu dengan menentukan 1 (satu) desa.

Analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisa terhadap data dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga data tersebut dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Tujuan dari menganalisa data adalah untuk mengungkapkan data apa yang perlu dicari, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, serta kesalahan apa yang perlu diperbaiki. Selain itu, analisa data bertujuan untuk mendeskripsikan data sehingga karakteristik data dapat dipahami. Serta membuat suatu kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pendugaan atau estimasi.

Adapun prosedur dari analisis data yang akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data melalui instrumen dari pengumpulan data.
2. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian instrumen pengumpulan data.
3. Tahap pengkodean, proses identifikasi dan klasifikasi dari tiap pertanyaan yang terdapat didalam instrumen pengumpulan data.
4. Tahap pengujian data, yaitu menguji validitas dan realibilitas instrumen pengumpulan data.

5. Tahap penyajian data, dengan merangkai data menjadi suatu kesatuan agar dapat dirumuskan kesimpulan dengan melakukan tinjauan ulang lapangan, serta mendapatkan hasil yang valid.

Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif, langkah analisis yang digunakan atau yang ditempuh adalah memaparkan, menggambarkan bagaimana evaluasi penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa. berdasarkan akuntabilitas dikategorikan sebagai tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*). Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis, teori dan pendapat pakar yang relevan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas external), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (objektifitas) (Emzir, 2010:79). Namun dalam penelitian ini hanya digunakan dua pengujian yang sesuai, yaitu *uji credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal).

1. Uji Credibility (Validitas Internal)

Uji validitas internal dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat

dipercaya oleh semua pembaca secara kritis. Kriteria ini berfungsi melakukan *inquiry* sedemikian rupa sehingga kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, penggunaan bahan referensi, dan diskusi dengan teman sejawat sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber data

Teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang terkumpul untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data-data tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan berbagai sumber data dalam menghasilkan data dan informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi sendiri menurut Norman (2007) adalah gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Hal ini dapat berupa penggunaan sumber, metode penyidik dan teori.

Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan dalam hal ini teori akuntansi syariah untuk melihat nilai-nilai islam atas objek penelitian sehingga memperoleh gambaran atau temuan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman

pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

Triangulasi data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui sumber data utama yaitu *annual report* dan berita-berita terkait aktivitas perusahaan di berbagai media. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

b. Menggunakan bahan referensi

Peneliti menggunakan alat pendukung yang digunakan untuk memperoleh data sehingga dapat membuktikan data penelitian berupa instrumen penelitian.

c. Diskusi

Yakni diskusi yang dilakukan dengan orang yang kompeten pada bidangnya dan mampu memberikan masukan ataupun sanggahan sehingga memperoleh kemantapan terhadap hasil penelitian. Teknik ini digunakan agar peneliti dapat mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran serta memberikan kesempatan awal yang baik untuk memulai menjejak dan mendiskusikan hasil penelitian dengan orang yang dianggap kompeten.

2. Uji *Transferability* (Validitas Eksternal)

Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif memiliki sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, akan tetapi dapat dikatakan memiliki

keabsahan eksternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama.

Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian ini untuk selanjutnya dapat diterapkan, maka pembuatan laporan ini akan dibuat secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Sehingga memiliki kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, maka hasil penelitian menjadi lebih jelas, sehingga dapat memutuskan bisa atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar *transferability*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Jenetallasa

Kecamatan Pallangga merupakan daerah dataran yang berbatasan Sebelah Utara Kecamatan Sombaopu Sebelah Selatan Kecamatan Bajeng Sebelah Barat Kecamatan Barombong, sedangkan di Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bontomarannu. Dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 16 (enam belas) desa/kelurahan dan dibentuk berdasarkan PERDA No. 7 Tahun 2005. Adapun salah satu desa yang ada di kecamatan pallangga yaitu Desa Jenetallsa.

Pada awalnya Desa Jenetallasa merupakan desa yang terbentuk dari pemekaran desa dari desa kanjilo. Jene yang artinya air dan tallasa berawal dari adanya mata air yang tidak pernah kering walau saat musim kemarau dan sekarang mata air tersebut dijadikan sumur dan sampai sekarang walau musim kemarau panjang disaat semua sumur warga disekitarnya kering tapi sumur jenetallasa tidak pernah kering airnya sampai saat ini. Desa Jenetallasa penduduknya kedua paling padat dikabupaten Gowa karena banyaknya perumahan-perumahan warga yang menjadikan Desa Jenetallasa tempat yang aman nyaman dan bersahabat.dari desa ini juga salah satu dijadikan jalan alternatif terbaik untuk menuju kota Gowa dan Makassar.

a. Visi

Terciptanya pemerintah desa yang berkualitas, maju dan mandiri dalam mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera.

b. Misi

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang berwibawah, transparan dan professional.
2. Menciptakan infrastruktur lingkungan desa yang baik.
3. Menciptakan masyarakat yang mempunyai sumber daya manusia yang handal.
4. Menciptakan sumber daya manusia dan lembaga masyarakat yang andal.

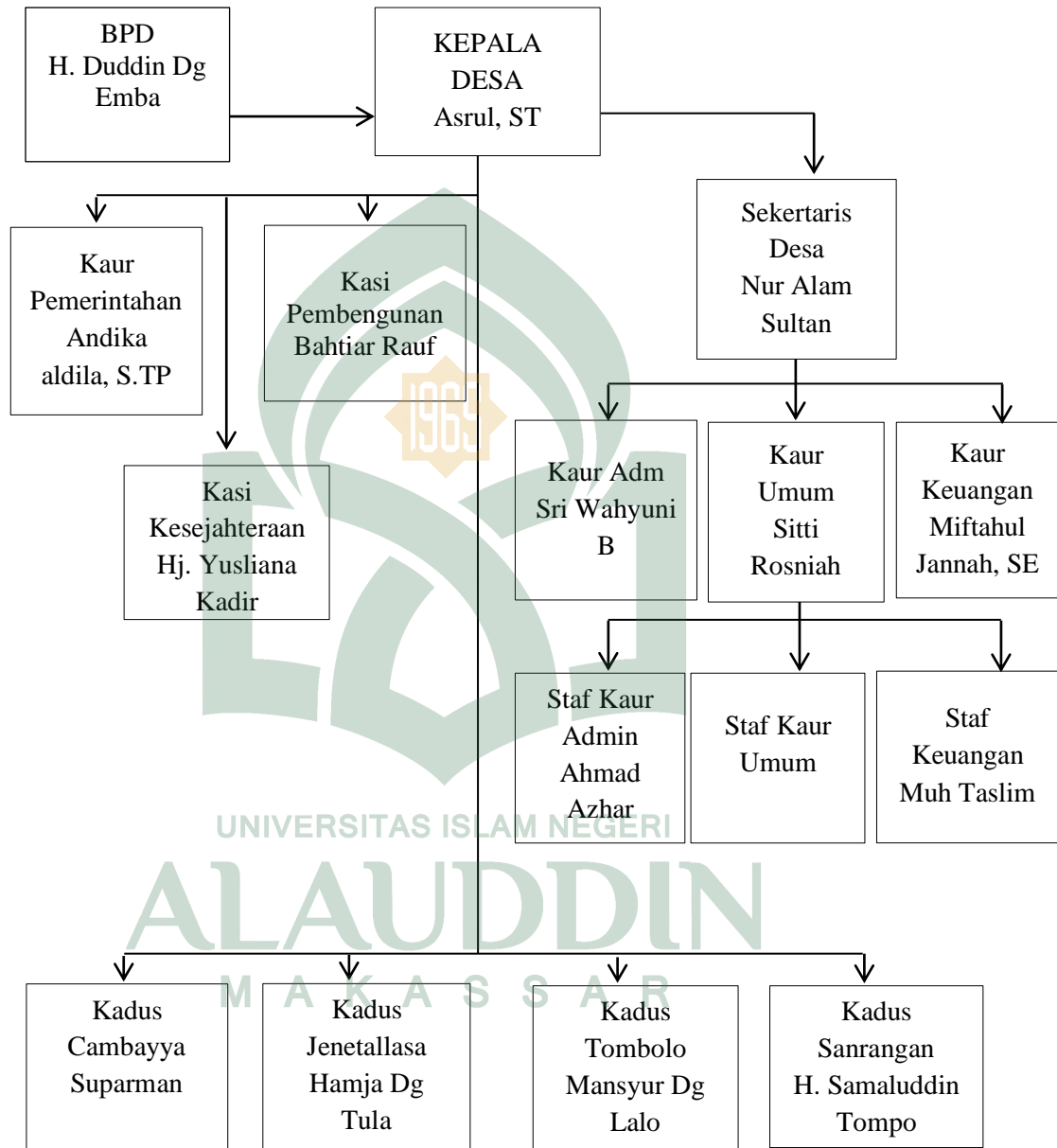
Desa Jenetallasa adalah daerah dataran yang berbatasan sebelah utara desa Taeng sebelah selatan kecamatan barombong sebelah barat kecamatan barombong dan disebelah timur berbatasan dengan desa Bontotala. Jumlah penduduk Kecamatan Pallangga sebesar 19.184 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar 9.633 jiwa dan perempuan sebesar 9.511 jiwa dan sekitar 99,45 persen beragama Islam. Beberapa fasilitas umum yang terdapat di Kecamatan Pallangga seperti sarana pendidikan antara lain Taman Kanak-Kanak Negeri sebanyak 2 buah, dan Tk Swasta Sebanyak 1 buah, Sekolah Dasar Inpres 2 buah, Sekolah Lanjutan Pertama negeri 1 buah, Disamping itu adapun sarana kesehatan, Puskesmas 1 buah dan lain-lain. Ada juga tempat ibadah (Masjid dan Surau), dan pasar. Penduduk Desa Jenetallasa umumnya

berprofesi sebagai petani, sedangkan sektor non pertanian terutama bergerak pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.

2. Struktur Desa

Sesuai dengan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang pemerintah desa dijelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa di Desa Jenetallasa pada umumnya sama dengan desa-desa pada lainnya di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa pada umumnya yang terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh seorang sekretaris serta 3 (tiga) orang kepala urusan yaitu, kepala urusan administrasi, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan umum serta 3 (tiga) kepalaseksi sebagai pelaksana teknis Yaitu Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan Dan Kepala Seksi Kesejahteraan. Selain Itu Terdapat 4 (Empat) Kepala Dusun Yaitu Kepala Dusun Sebagaia Pelaksana Unsur Kewilayaan Yaitu, Kepala Dusun Cambayya, Kepala Dusun Jenetallasa, Kepala Dusun Tombolo, Kepala Dusun Sanrangan serta dibantu oleh satu orang staf kepala urusan bagian keuangan.

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Desa



3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Pembangunan dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan sosial dapat dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana dalam menyediakan segala kebutuhan masyarakat dalam lingkungan. Seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan sarana keagamaan.

a) Sarana pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang memiliki peranan penting dalam kehidupan. Pendidikan sangat berperan dalam pembentukan pola pikir dalam pengembangan kualitas hidup masyarakat, dan ketersediaan sarana maupun prasarana. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang sangat mendukung dalam pengembangan masyarakat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Distribusi Jumlah Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan	Frekuensi	Prosentase(%)
Taman kanak-kanak	3	30,0
TPA	1	25,0
Sekolah Dasar	2	20,0
SMA/SMK	1	25,0
Total	7	100

Sumber: Kantor Desa Jenetallasa, 2018

a) Sarana keagamaan

Dalam hal keagamaan penduduk Desa Jenetallasa rata-rata menganut agama islam. Sarana keagamaan di Desa Jenetallasa terdiri dari sarana peribadatan berupa Masjid yang berjumlah 3 buah dan tidak terdapat rumah peribadatan yang lain.

b) Sarana kesehatan

Terpenuhnya kebutuhan masyarakat dalam hal kebutuhan akan kesehatan dapat dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Seperti di Desa Jenetallasa terdapat 2 macam sarana kesehatan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Distribusi Jumlah Sarana Kesehatan

Sarana/ prasarana	Frekuensi	Prosentase (%)
Puskesmas/pustu	1 (satu)	50,0
Posyandu	1 (satu)	50,0
Total	2	100,00

Sumber: Kantor Desa Jenetallasa, 2018

c) Sarana air bersih

Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Air bersih juga merupakan faktor yang sangat menunjang kebutuhan akan kesehatan suatu masyarakat. Akan tetapi di Desa Jenetallasa tidak adanya pelayanan air bersih seperti PAM, dan MCK. Jika dilihat dari letak geografis Desa Jenetallasa, sebagian besar merupakan pemukiman penduduk yang dilintasi oleh sungai kecil (kanal) yang berasal dari

perairan dan terdapat banyak pemukiman penduduk yang padat. Para anggota masyarakat menjadikan daerah sungai (kanal) tersebut sebagai tempat pembuangan sampah. Sehingga sungai-sungai kecil maupun SPAL (Saluran pembuangan Air Limbah) yang ada di sekitar wilayah pemukiman penduduk menjadi tercemar dan menghasilkan bau yang tidak enak serta merupakan tempat bersarangnya berbagai macam penyakit.

Pembangunan merupakan proses mengadakan atau membuat dan mengatur sesuatu yang belum ada termasuk memajukan, memperbaiki atau meningkatkan daya guna sesuatu yang sudah ada. Pembangunan nasional bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut, harus ada usaha dan kerja keras dari semua pihak yang terkait. Pemerintah, perencana, dan masyarakat itu sendiri. Tuntutan dari perkembangan zaman membawa pembangunan dalam dimensi yang senantiasa mengalami dinamika perubahan. Hal ini menjadikan pembangunan haruslah memiliki sistem perhitungan kompleks. Perencana pembangunan harus mampu memperhitungkan aspek yang melandasi terjadinya pembangunan yang sinergis dan sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Gambaran informan

Kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa, di bantu oleh PTPKD. PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari Sekertaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. PTPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, Sekertaris Desa

bertindak selaku Korordinator PTPKD. Sekertaris Desa selaku coordinator PTPKD mempunyai tugas;

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan ABDesa.
2. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBD PTKD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
4. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Bendahara Desa dijabat oleh staf pada urusan keuangan Bendahara desa yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam angka pelaksanaan APBDesa.

Tabel 4.4
Informan Desa Jenetallasa

No	Nama	Jabatan
1	Nur alam Sultan	Sekertaris Desa
2	Muh.Taslim	Bendahara Desa

C. Pengelolaan Sistem Keuangan Desa

Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sedangkan yang di maksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang di mulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Aspek perencanaan dan penganggaran, diarahkan agar seluruh proses penyusunan APB Desa dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam menetapkan arah kebijakan umum berdasarkan skala prioritas serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Melalui arah kebijakan perencanaan anggaran yang skala prioritas dan pelibatan partisipasi masyarakat desa ini berarti memberi makna bahwa setiap penyelenggaraan di desa berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya. Proses penganggaran merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi apakah pemerintahan desa melakukan tugasnya secara efektif dan efisien, dengan melakukan hal yang benar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Aspek pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa, bahwa pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, selanjutnya dalam pelaksanaannya Kepala Desa dibantu oleh Bendaharawan Desa, perangkat desa beserta masyarakat. Aspek pertanggungjawaban keuangan desa, bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas dan transparan maka Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan keuangan desa wajib menyampaikan pertanggungjawabannya Kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Melalui pengaturan beberapa aspek tersebut diharapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa secara rinci dapat ditetapkan di setiap desa, sehingga mendorong desa menjadi lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif menuju efisiensi.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan/pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari narasumber diperoleh gambaran bahwa aparat desa sudah mengetahui secara garis besar mengenai gambaran umum aplikasi sistem keuangan desa (selanjutnya disingkat dengan (SISKEUDES) dan penerapan aplikasi tersebut .

Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Bendahara Desa jenetallasa yaitu Pak Taslim menyatakan bahwa:

“*Kalo* [kalau] Aplikasi Sistem Keuangan Desa disingkat (SISKEUDES), aplikasinya itu baru memang diterapkan di Desa Jenetallasa sudah sejak tahun 2015 Tapi *kalo* [kalau] penerapannya *belumpi* [belum] diterapkan langsung, kan ada itu namanya proses percobaan dan belajarkan, jadi kita disini belajar dulu, *nah* [kemudian]

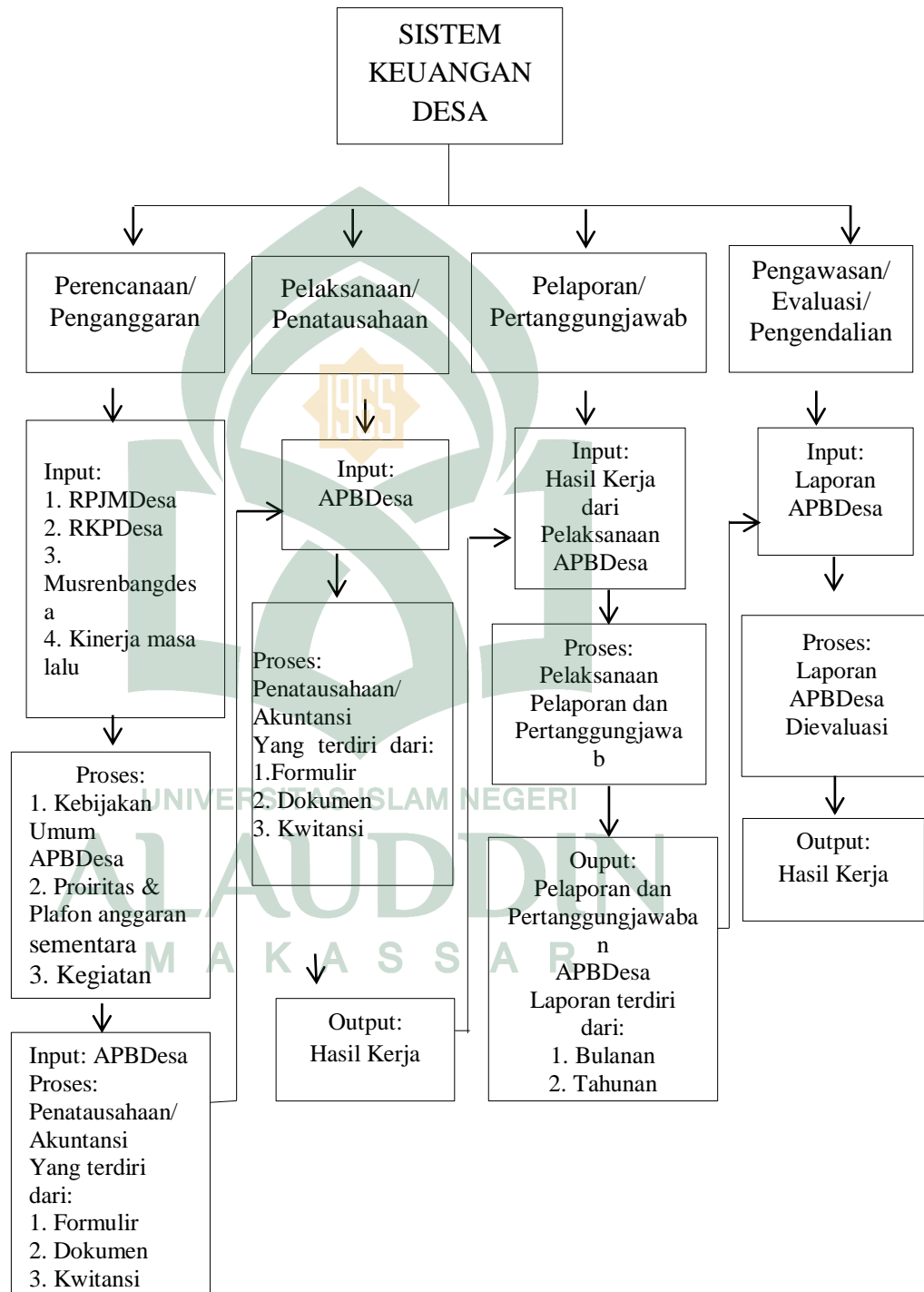
bendahara di Desa Jenetallasa *dikasi* [diberi] pelatihan *kalo* [kalau] tidak salah kurang lebih enam bulan lamanya itu, *nah* [selanjutnya] *setelahmi* [setelah selesai] *dikasi* [diberi] pelatihan, *nah* [selanjutnya] *barupi* [baru] tahun 2016 tahun, lalu *barupi* [baru] rangkup semua, itu aplikasi *hampirmi* [sudah hampir] berjalan 2 (dua) tahun karna *kalo* [kalau] diakhir 2017 genapmi 2 tahun di aplikasi itu lagi *terbagiki* [terbagi] 4 modul yang pertama modul perencanaan, modul penganggaran, modul penatausahaan atau pelaporan dan modul pertanggungjawaban. (Wawancara Tanggal, 12 Desember 2017 Pukul 14.15 WITA).

Demikian juga pernyataan yang di berikan oleh Pak Alam sebagai Sekertaris desa yang mengatakan bahwa:

“*Kalo* [kalau] ini aplikasi sistem keuangan desa yang dikembangkan di Desa Jenetallasa *barupi* [baru] diterapkan sejak tahun 2015 tapi *kalo* [kalau] penerapan aplikasi itu *belumpi* [belum] berjalan lancar ditahun itu, karena aparat desa baru belajar karena aplikasi baru dan *belumpi* [belum semua] langsung diketahui aplikasi tersebut diketahui oleh aparat desa makanya bendahara diberi pelatihan khusus 6 bulan lamanya *dikasi* pelatihan dulu *nah* [selanjutnya] baru 2016 ditetapkan secara menyeluruh (Wawancara Tanggal, 12 Desember 2017 Pukul 15.40 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa mengenai penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Jenetallsa sudah diterapkan pada tahun 2015 dan dalam berproses penerapannya dalam hal ini aparat desa diberi bimbingan dan pelatihan khusus. Agar dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan aplikasi dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berikut dapat digambarkan berdasarkan hasil wawancara di lapangan mengenai sistem pengelolaan keuangan desa:

Gambar Struktur 4.4
Sistem Keuangan Desa



Sumber data diloah 2018

Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang lebih tinggi daripada hanya merupakan cara, tata, rencana, skema, prosedur, atau metode. Kemudian menurut (Mamesah, 1995) menyatakan bahwa sistem adalah sebagai kebulatan yang berliku-liku dan tetap dari hal-hal atau unsur-unsur yang saling berhubungan dan disatu padukan berdasarkan sesuatu asas tata tertib. Selanjutnya menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan bahwa sistem sebagai suatu totalitas yang terdiri dari sub sistem dengan atribut-atributnya yang satu sama lain berkaitan, saling ketergantungan satu sama lain, saling berinteraksi dan saling pengaruh mempengaruhi sehingga keseluruhannya merupakan suatu kebulatan yang utuh serta mempunyai peranan dan tujuan tertentu.

Melaksanakan sistem keuangan desa harus saling berinteraksi dan saling pengaruh satu sama lain dan merupakan satu unsur atau elemen yang saling berhubungan. Administrasi keuangan memiliki arti, manfaat dan pengaruh yang begitu besar terhadap nasib suatu bangsa. Segala kebijakan yang ditempuh di bidang administrasi keuangan bisa berakibat kemakmuran atau kemunduran serta kejayaan suatu bangsa. Kepandaian mengendalikan negara dibarengi dengan kepandaian mengendalikan keuangan akan memberi hasil yang memuaskan sesuai yang diharapkan. Sebaliknya tanpa mengendalikan keuangan dengan baik serta kurang mampu melihat kedepan dapat berakibat suatu kehancuran. Hal ini dapat berlaku bagi administrasi keuangan di daerah otonom.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Kemudian dalam aplikasi SISKEUDES terbagi atas 4 modul yaitu sebagai berikut:

1. Modul Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi. Melalui pengaturan beberapa aspek tersebut diharapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa secara rinci yang dapat diterapkan dalam setiap desa, sehingga mendorong desa menjadi lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif menuju efisiensi.

Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi (Bastian, 2015). Perencanaan dalam penegelolaan keuangan desa adalah landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, tujuan dapat tercapai apabila dilandasi dengan sebuah perencanaan yang baik pula sehingga apa yang menjadi tujuan dari sebuah perencanaan tersebut dapat tercapai

dengan baik. Proses dari pengelolaan keuangan desa yang baik, sehingga apapun tujuannya dapat tercapai sesuai dengan apa yang di inginkan.

Berdasarkan pernyataan dari Pak Taslim sebagai Bendahara Desa Jenetallasa menyatakan bahwa:

“*Kalo [kalau] di dalam proses modul perencanaan yang ada pada Desa Jenetallasa, pertama perencanaannya itu dilakukan musyawarah desa, nah [kemudian] setelah itu dilakukanmi [dilakukanlah] rapat tersebut lalu dilakukanmi [kita lakukan] terakhir penetapan RKPDesa (Rencana Kerja Perangkat Desa) setelah itu di masukkan kedalam perangkat aplikasi sistem keuangan desa. Kemudian dalam pengimputannya yang dimasukanlah kedalam modul perencanaan. (Wawancara Tanggal, 12 Desember 2017 Pukul 15.50 WITA).*”

Berdasarkan wawancara tersebut dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan melibatkan masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui perencanaan yang dibuat dan dapat berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melakukan suatu pekerjaan, niat dan perencanaan sangat penting. Segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Dalam hadist riwayat Bukhari Muslim dari ‘Umar bin Khoththob bersabda yang artinya:

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahnya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. (*HR. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907*).”

Selain itu, juga dijelaskan dalam Surah Al-Hasyr ayat 18 (Departemen Agama RI, 2010):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Maksud dari hadist dan ayat diatas yaitu perencanaan yang diawali dengan niat yang baik akan mencapai tujuan yang baik pula. Niat adalah tolak ukur suatu amalan; diterima atau tidaknya tergantung niat dan banyaknya pahala yang didapat atau sedikit pun tergantung niat. Niat adalah perkara hati yang urusannya sangat penting, seseorang bisa naik ke derajat shiddiqin dan bisa jatuh ke derajat yang paling bawah disebabkan karena niatnya.

2. Modul Penganggaran

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a) Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
- b) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa.

- c) Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- e) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan bupati/walikota yang menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.

- f) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Sesuai pernyataan yang dijelaskan diatas sebagaimana penjelasan Pak Taslim sebagai Bendahara desa yang menyatakan bahwa:

“*Kalo* [kalau] pengoperasiannya itu modul penganggaran digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa). Kalau Pengimputannya itu *dilakukanki* [kita lakukan] secara berurut sesuai menunya yang disediakan dalam aplikasi. Petunjuk pengimputan data anggarannya yang digunakan itu yang pertama kita buka dulu data umum desanya kemudian *klikki* [diklik] menu isian data anggarannya *digunakanki* [digunakan] untuk lakukan pengimputan data pemerintah desa seperti nama Kepala Desa, nama sekertaris desa, tanggal perdesa dan tanggal PAK. Kemudian yang pengisiannya yaitu yang pertama *isiki* [diisi] dulu dari menu entri kemudian *klikki* [diklik] kolom penganggaran lanjut *isiki* [kita isi] isian data anggaran kemudian pilih desa misalnya Desa jenetallasa kemudian kecamatan klik pilih desa setelah selesai klik tombol tambah dan kemudian diakhiri dengan klik tombol simpan. (Wawancara Tanggal, 12 Desember 2017 Pukul 14.22 WITA).”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses penganggaran yang dilakukan di Desa Jenetallasa tersebut telah terstruktur dengan baik dalam hal pengelolaan anggaran dan proses penggunaan dana sudah dapat diketahui karena setelah dilakukan proses perencanaan lalu dilakukan proses penganggaran yang kemudian diinput masuk kedalam aplikasi SISKEUDES dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelolaan di Desa Jenetallsa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan keuangan diakhir kegiatan.

3. Modul Pelaksanaan/Penatausahaan

Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Penatausahaan keuangan desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa tahun 2014 sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa.

Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari APBDesa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program APBDesa wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa.

Berdasarkan pernyataan dari Pak Taslim sebagai Bendahara Desa Jenetallasa menyatakan bahwa:

“*Kalo* [kalau] dibagian pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel di Desa Jenetallasa tersebut dengan mengkomparasikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya itu *haruski* [sudah harus] sesuai dengan unsur-unsur didalam pelaksanaan pengelolaan keuangan itu sendiri yaitu pelaksanaan keuangannya *haruski* [kita harus] laksanakan dengan adanya pencatatan dulu sama bendahara terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, adanya penerimaan dan pengeluaran *haruski* [harus] melalui rekening Desa, adanya persetujuan dari Kepala Desanya dalam pencairan keuangan desa akan tetapi setelah diterapkannya

aplikasi SISKEUDES tersebut isian resi-resinya itu langsung *dimasukkanmi* [kami masukkan] kedalam aplikasi adapun input datanya yaitu yang pertama bukaki dulu menu parameter rekening bank desa sehingga *tampakki* [sudah tampak] isiannya, yang kedua pilihki [kita pilih] desa yang akan di input datanya kemudian *klikki* [diklik] tombol rekening kas desanya sehingga tampak form berlaku lalu diisi dan terakhir di klik tombol simpan”. (Wawancara Tanggal, 12 Desember 2017 Pukul 14.29 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara Desa Jenetallasa. Bendahara desa wajib mencatat terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Di Desa Jenetallasa memiliki alur penatausahaan yakni melakukan penulisan dengan cara yang sederhana, yaitu berupa menulis pembukuan dan menyimpan bukti-bukti pembayaran dan setelah dikumpulkan isian dari resi-resi tersebut kemudian dimasukkan kedalam aplikasi SISKEUDES. Dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel di Desa Jenetallasa tersebut dengan mengkomparasikan dalam penatausahaan keuangan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam penatausahaan keuangan itu sendiri yaitu penatausahaan keuangan harus dilaksanakan dengan adanya pencatatan oleh bendahara terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

4. Modul Pertanggungjawaban

Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan. Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua *stakeholders* pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel mulai

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan.

Pemerintahan Desa dalam mempertanggungjawaban kepada masyarakat berdasarkan pembangunan yang menggunakan dana dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali pemerintahan desa melakukan musyawarah melalui forum evaluasi pelaksanaan APBDesa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke desa.

Dari hasil wawancara dari Pak Taslim sebagai Bendahara Desa Jenetallasa menyatakan bahwa:

“*Kalo* [kalau] itu modul yang terakhir ini yaitu bagaimana aparat desanya itu lakukan pelaporann yang pertama yaitu *haruski* [kita harus] lakukan dulu laporan realisasi anggaran yang hasilnya itu diambil dari modul penatausahaan, kedua saldo awalnya *digunakanki* [kita gunakan] untuk *catatki* [dicatat] saldo asetnya sama kewajiban untuk *dihasilkanki* [menghasilkan] laporan kekayaan milik desa, ketiga menu penyesuaiannya itu digunakan untuk *catatki* [dicatat] perubahan assetnya

atau kekayaan milik desa mulai tahun berjalan dan terakhirnya itu desa yang terakhir *dilakukanmi* [kami lakukan] koreksi pendapatan dan belanjanya yang sudah dicatat secara *jelasmi* [jelas].(Wawancara Tanggal, 12 Desember 2017 Pukul 14.35 WITA).”

Berdasarkan dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengimputan dan pelaporanya di Desa Jenetallsa sudah melalukan proses pertanggungjawabannya sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik sehingga proses pengelolaan sudah sesuai dengan Peraturan Permendagri No 37 Tahun 2014.

D. Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Setelah Penerapan Aplikasi

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraan, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ negara seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). Dalam hal ini, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun pada alinea ke-4 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktor

yang mempengaruhi tidak berjalannya pelayanan publik dengan baik yaitu mengenai struktural birokrasi yang menyangkut penganggaran untuk pelayanan publik.

Mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah adanya kendala kultural di dalam birokrasi. Selain itu ada pula faktor dari perilaku aparat yang tidak mencerminkan perilaku melayani, dan sebaliknya cenderung menunjukkan perilaku ingin dilayani. di departemen atau pemerintahan paling rendah, yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya, yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku. Subjek good governance, pelayanan publik. Berdasarkan hal yang penting diperhatikan dalam kualitas akuntabilitas keuangan yaitu;

1. Good Governance

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu paradigam pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* kearah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Mardiasmo, 2002). Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan

keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa, 2008).

Dari hasil wawancara dari Pak Alam sebagai Sekertaris Desa Jenetallasa menyatakan bahwa:

“Disini dalam terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan *nah* [selanjutnya] salah satu hal terpenting dalam tercapainya tata kelola desa yang baik itu keuangan desanya, karena keuangan desa itu memang faktor utama yang *haruski* [kita harus] perhatikan *mulaiki* [mulai] dari proses keluaran dan masukannya uang *haruski* [kita harus] diketahui. *Nah* [selanjutnya] setelah penerapan ini aplikasi sudah terangkup *jelasmi* [sudah jelas] ini untuk *ditauki* [sudah diketahui] kemana itu uang dikeluarkan karena *kalo* adami [kalau sudah] dilakukan transaksi keluarannya *langsungmi* [sudah langsung] di masukan didalam aplikasi dan itu *langsungmi* [bisa langsung] dilihat dipusat makanya *tidak adami* [sudah tidak] lagi keraguan apalagi hal yang tidak di inginkan seperti dulu ada penyalahgunaan dana, kemudian dalam hal pertanggungjawabannya kan itu proses pertanggungjawabannya itu toh ada 2 pertanggungjawaban itu harus dibuat oleh aparat desa yang pertama yaitu pertanggungjawaban tahunan, yang kedua yaitu pertanggung jawaban bulanan, *nah* [selanjutnya] pertanggung jawaban bulanan ini harus dibuat dan *dirangkupki* [dirangkup] setiap akhir bulan sesuai peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah pusat, *nah* [selanjutnya] *itumi* [itu] aplikasi siskeudes memang sangat baik dan bermanfaat dalam memujudkan tata kelola desa yang akuntabel di Desa Jenetallasa” (Wawancara Tanggal, 12 Desember 2017 Pukul 15.50 WITA).”

Demikian pula dengan pernyataan dari Pak Taslim sebagai Bendahara Desa Jenetallasa menyatakan bahwa;

“Didalam penerapannya ini aplikasi SISKEUDES di Desa Jenetalasa sangat baik, karena *mempercepatmi* [dapat mempercepat] pelaporannya kemudian hal paling saya lihat karena aparat desa saya perhatikan sudah *rajinmi* [rajin] semua dan tidak *lambatmi* [lambat lagi] dalam proses pengerjaannya. Yang dahulunya itu *kalo* sudah jam 2 *siangmi* [siang] kantor itu sudah *mulaimi* [mulai] sepi sekarang tidak ada lgi yang seperti

itu sekarang mulai *semuami* [semuanya] taat peraturan(Wawancara Tanggal, 12 Desember 2017 Pukul 14.49 WITA).”

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan aplikasi siskeudes di Desa Jenetallsa sangat membawa perubahan, baik dalam proses pelaporan, pertanggungjawaban, dan keaktifan aparat desa dalam melakukan pekerjaannya dan aplikasi ini sangat memudahkan aparat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang kemudian bermanfaat dalam memujudkan tata kelola desa yang akuntabel. Kemudian Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

a) Transparansi

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan

kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Bappenas 2003). Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik.
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani (Bappenas 2003).

b) Partisipasi

Partisipasi menurut LAN dan BPKP (2000) adalah setiap warganegara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang

menyimpang. Prinsip dan indikator partisipasi masyarakat dalam penganggaran menurut (Taufik, 2013) mencakup hal-hal berikut:

1. Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran.
2. Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media check and balances.
3. Adanya sikap proaktif pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran. Hal ini mengingat kesenjangan yang tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan cita-cita mewujudkan APBD yang aspiratif.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam perumusan perancangan APBDesa. Badan Permusyawaratan Desa mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam pembangunan desa. Masyarakat tetap mendampingi pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa sampai tahap akhir yaitu ikut mengevaluasi laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDesa dari media informasi yang disediakan oleh Desa. Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah tetap mengadakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

c) Akuntabilitas

Pengelolaan berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Untuk itu,

diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif. Akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis syariah dan merupakan prasyarat yang diperlukan untuk memahami kinerja yang berkesinambungan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap elemen organisasi dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis syariah dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati (Peraturan Menteri BUMN R.I). Sedangkan menurut (Chandra, 2013) kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggung jawab organ sehingga pengelolaan terlaksanan secara efektif. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra/17: 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemah;

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban (Q.S Al-Isra/17: 36)”.

Akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya, akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP 2000).

Dari hasil wawancara dari Pak Alam sebagai Sekertaris Desa Jenetallasa menyatakan bahwa:

“*Kalo* [kalau] proses pelakasanaannya ini aplikasi ini pelaporanya cepatmi [sudah cepat] karena dulunya itu sebelum penerapan aplikasi siskeudes aparat desa masih kita *kalo* [kami melakukan] proses secara manual seperti itu resi-resi pembayaran biasanya dicari lagi sebelum dibuat laporan pertanggunggung jawaban keluaran *belumpi* [belum] lagi kalau misalnya resi *hilangmi* sedeng [hilang lagi] atau tercecer kan itu tentu *berpengaruhki* [dapat berpengaruh] dalam proses pertanggung jawabanya itu lagi *kasi lamaki* [membuat lama] rangkup dalam waktu yang *dikasiki* [diberikan] untuk *selesaikanki* [menyelesaikan] yang pastinya *menghambatki* [dapat menghambat] proses kerja yang ada pada desa. Sebelum penerapannya kan diketahui masih dilakukan proses pelaksanaan secara manual, yang proses pengerjaannya masih lambat sekali buat pelaporannya itu dan setelah *penerapannyami* [penerapannya]

ini aplikasi siskeudes aparat desa *harusmi* bikin [harus membuat] pelaporan sesuai yang telah diterapkan ya intinya *mempercepatmi* [sangat mempercepat] pelaksanaan dan pertanggung jawabannya,” (Wawancara Tanggal, 12 Desember 2017 Pukul 15.55 WITA).”

Dari hasil wawancara diatas, yaitu Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci di dalam penyelenggaraan pemerintahan ataupun penyelenggaraan perusahaan yang bagus, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat.

Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya (Sulistiyan, 2004). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi siskeudes merupakan hal yang dapat menghasilkan peningkatan kualitas desa yang baik, menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan dalam penerapan aplikasi siskeudes di Desa Jenetallasa menghasilkan laporan keuangan dengan hasil baik, relevan dan akuntabel.

E. Theory Kepatuhan dalam Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan didalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Berdasarkan perpektif normatif maka seharusnya teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi (Rosalina, 2010).

Kepatuhan berasal dari kata yang patuh, yang menurut kamus bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, dan patuh pada ajaran dan peraturan. Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan yang semakin berat dan kompleksnya tugas pemerintah desa, maka Kepala Desa dan perangkat desa semakin dituntut memberikan hasil terbaik dalam menjalankan tugasnya. Dengan terbaiknya sistem yang baik dalam mengelola keuangan desa diharapkan pemerintah desa mampu mandiri dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundanga-undangan yang berlaku sertam mampu mencapai tujuna yang diharapkan, sehingga menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksiamal untuk kepentingan masyarakat.

Komitmen moralitas melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusunan hukum tersebut memiliki aturan untuk melihat perilaku. Teori kepatuhan dapat mendorong

seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban laporan keuangan dalam aplikasi SISKEUDES laporan tahunan wajib disertai dengan laporan keuangan dan disampaikan kepada Peraturan ini mengisyaratkan kepatuhan setiap pelaku individu maupun pemerintah desa untuk menyampaikan laporan keuangan triwulan dan tahunan secara tepat waktu kepada pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*). Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu (Saleh, 2004).

Berdasarkan pernyataan dari Pak Alam sebagai Sekertaris Desa Jenetallasa menyatakan bahwa:

“*Kalo* [kalau] mengenai kepatuhan kami lakukan proses pengelolaan aplikasi SISKEUDES sesuai dengan yang telah diterapkan pemerintah pusat, kami sudah *patuhiki* [mematuhi] peraturan yang telah dikeluarkan dengan bersikap adil dalam menjalankan tugas sehingga *kita berikan* [memberikan] hasil pertanggung jawaban yang bersifat relevan dan akuntabel dan *kalo* [kalau] ada terjadi kesalahan baik itu dalam proses pengelolaan dan pertanggung jawabannya maka kita [kami] disini harus secepatnya *diperbaiki* [dilakukan] perbaikan. (Wawancara Tanggal, 12 Desember 2017 Pukul 15.55 WITA).”

Berdasarkan pernyataan diatas yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di Desa Jenetallasa menerapkan prinsip patuh dan taat pada dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta bersikap adil dalam menyampaikan informasi. Sesuai dengan Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisaa' ayat 4:58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisaa' ayat 58).”

Allah SWT memberitahukan bahwa dia memerintahkan agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini kemudian mengajarkan kita selalu bersikap adil kepada semua manusia yang dimana setiap manusia dierintahkan kepada Allah SWT agar senantiasa menyampaikan laporan atau informasi yang sesuai kepada pemerintah dan masyarakat, kemudian bisa ditarik kesimpulan bahwa di Desa Jenetallasa sudah menerapkan prinsip kepatuhan dan ketaatan yaitu menjalankan peraturan sesuai dengan yang peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan oleh karena prinsip inilah yang jika ingin mencapai tata kelolah desa yang baik dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan serta pengamatan peneliti maka telah dilakukan teknik pengujian keabsahan data yaitu validitas internal (*Uji Credibilitay*), uji validitas dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Kemudian dalam penelitian ini digunakan triangulasi dan penggunaan bahan reverensi, triangulasi sumber data yaitu teknik

pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang terkumpul untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data-data tersebut dengan menggunakan triangulasi teori dan triangulasi data. Validitas Eksternal (*Uji Transferability*), keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Agar dapat dipamahami hasil penelitian ini dapat diterapkan, maka pembuatan laporan ini akan dibuat secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Sehingga akan diterapkan untuk hasil penelitian tersebut.

Dari semua pernyataan diatas yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa responden, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan aplikasi SISKEUDES yang ada di Desa Jenetallasa telah diterapkan dengan baik, karena proses pengelolaan aplikasi siskeudes di Desa Jenetallsa telah dilakukan secara terstruktur baik dari proses pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya terbilang sangat baik, dimana tidak adanya celah yang berupa dilakukannya tindakan penyimpanan. sehingga semua proses pengerjaan sudah sangat baik bahkan sampai kepala desa di Desa Jenetallasa menyatakan bahwa penerapan aplikasi siskeudes merupakan aplikasi yang sangat baik yang telah menghasilkan kualias akuntabilitas keuangan desa dan mewujudkan tata kelolah desa yang baik.

F. Perspektif Islam tentang Akuntabilitas

Prinsip ini di mana pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Untuk itu, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap organisasi

sehingga pengelolaan berjalan efektif. Akuntabilitas merupakan asas penting dalam instansi pemerintah atau bisnis syariah dan merupakan prasyarat yang diperlukan untuk memahami kinerja yang berkesinambungan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap elemen organisasi dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis syariah dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati (Peraturan Menteri BUMN R.I). Sedangkan menurut (Chandra, 2013) kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggung jawab organ sehingga pengelolaan terlaksanan secara efektif. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra/17: 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۚ ٣٦

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya (Q.S Al-Isra/17: 36)”.

Akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Pelaku bisnis syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

Dalam perkembangannya, meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa sebagai salah satu instansi pemerintahan yang menerapkan prinsip Islami senantiasa

melakukan pembenahan dan perbaikan dengan mengevaluasi kinerja di instansi pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengelolaan termasuk di antaranya dalam hal penatausahaan. Khusus terkait pengelolaan dan tanggung jawab aparat desa memiliki kebijakan tersendiri tentang hal ini.

Sesuai dengan teori keputusan akan memberantas penyimpangan agar semua aparat desa berperilaku jujur dan adil dan sesuai dengan ketentuan yang ada, kejujuran merupakan pilar terpenting dalam ekonomi islam, oleh karena itu proses pengeolaan keuangan desa yang ada di desa jennetallsa melakukan hal yang sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan sehingga aparat desa berkewajiban melaksanakan tugas jujur dan taat yang telah ditekakan oleh Al-qur'an sebagai misi para nabi yang telah diutus oleh Allah SWT termasuk penegakan keadilan. Allah SWT berfirman dalam Q.S AL-Hadid/57:25.

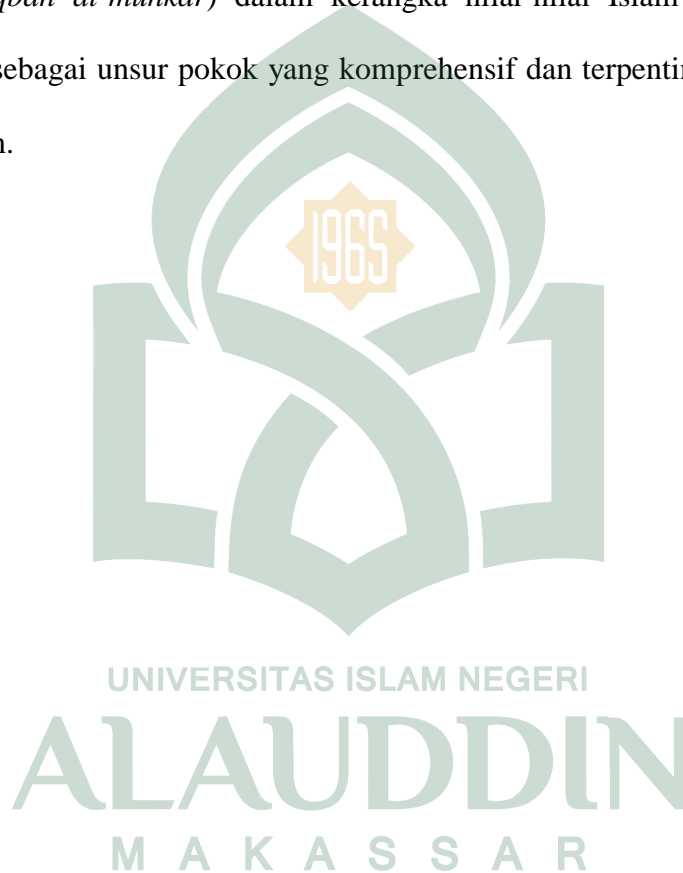
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٢٥

Terjemahnya:

“Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan (Q.S. Al-Hadid/57:25)”.

Dari ayat di atas kita ditegaskan untuk berperilaku jujur dari segala hal baik berupa materi maupun non materi, jujur merupakan prinsip utama untuk mencapai sebuah kualitas akuntabilitas keuangan desa yang bersinergi dengan hukum islam yang telah di tetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Kejujuran seringkali

diletakkan sederajat dengan kebijakan dan ketakwaan, seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama *muqashid* syariah. Ibnu Taimiyah menyebut keadilan sebagai nilai utaman dari tauhid, sementara Abduh menganggap kezdaliman (*zulm*) sebagai kejahatan yang paling buruk (*aqbah al-munkar*) dalam kerangka nilai-nilai Islam Sayyid menyebutkan keadilan sebagai unsur pokok yang komprehensif dan terpenting dalam semua aspek kehidupan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengelolaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Jennetallasa bahwa dalam proses pengimputan dan pelaporannya di Desa Jennetallasa sudah melakukan proses pertanggungjawabannya sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik. Kemudian di Desa Jennetallasa menerapkan prinsip patuh dan taat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta bersikap adil dalam menyampaikan informasi sehingga semua proses pengerjaan sudah sangat baik bahkan penerapan aplikasi siskeudes merupakan aplikasi yang sangat baik yang telah menghasilkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan mewujudkan tata kelola desa yang baik.
2. Berdasarkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Jennetallasa setelah penerapan aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan yang baik di Desa Jennetallasa, mempermudah dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan hasil peningkatan kualitas desa yang baik, menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan dalam penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Jennetallasa menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang diantaranya:

1. Teori kepatuhan merupakan hal yang sangat penting dalam instansi pemerintahan daerah ataupun pemerintah desa oleh karena itu, peneliti diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang hal tersebut dan sebagai bahan pertimbangan untuk penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang lebih baik kedepannya.
2. Selain mengenai teori kepatuhan, peneliti juga meninjau kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Jennetallasa maka dalam proses pengelolaan SISKEDES perlu lebih diperhatikan mengenai hal yang dapat memperlambat proses pengerjaan atau terjadinya kesalahan dalam pengimputannya sehingga menghasilkan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dalam hal ini memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa di Desa Jennetallasa lebih mengoptimalkan proses pengerjaannya sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam proses pengiputan dalam aplikasi SISKEUDES dan proses pelaporannya dapat mengurangi terjadinya pemberian informasi yang tidak relevan. Melakukan perbaikan apabila terjadi hal dalam memberikan mempengaruhi kinerja aparat desa yang kemudian dapat

berpengaruh pada kualitas akuntabilitas keuangan desa yang ada pada Desa Jennetallasa. Maka dariitu diharap pemerintah desa mampu mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang bisa timbul dalam proses pengimputan aplikasi SISKEDDES tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikuntoro, Suharsimi. 2006. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Bumi Aksara. Jakarta.
- Anwar, Misbahul dan Jatmiko, Bambang. 2013. Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). Jurnal Akuntansi. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2015. "Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa. jakatra
- BPKP, 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Tim penyusun Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta.
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Faozi, C. 2015. Harap-harap Cemas Undang-Undang Desa. *Available at <http://www.kompasiana.com>*.
- Kantaprawira, Rusadi. 1999. Sistem Politik Indonesia. Bandung.
- LAN dan BPKP, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penerbit LAN, Jakarta.
- Mamesah, D. J. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moedarlis, Fajar T. 2016. Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa. Hal : 1-17.
- Maryunani. 2006. Perspektif Pengelolaan Keuangan Dan Ekonomi Desa. Malang. Universitas Brawijaya.
- Mardiasmo. 2006. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta

- Newman, W. L. 1997. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. 3rd Edition. Boston Person Education Inc.
- Purwanto, N. 2008. *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2014 tentang Perencanaan Desa.
- Pengelolaan Keuangan Desa Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Didalam <http://bppk.kemenkeu.go.id/> diakses 20/10/2016 Pukul 23:32.
- Putra, Derhichard H. 2012. "Fenomenologi dan Hermeneutika: Sebuah Perbandingan". <http://kalamenau.blogspot.com>. (7 Agustus 2015).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.
- Rahmat, P. Saeful. 2009. Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*. Vol. 5, No 9. 1-8.
- Rosalina, Santi. 2010. Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi Berdasarkan Locus Of Control dan Gender. Surabaya.
- Santosa, P.B. Paradigma Penelitian Kualitatif. <http://images.purbayusbs.multiplycontent.com>.2007.
- Septiani, Aditya. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal yang Sedang Berkembang. *Tesis.Perspektif Teori Kepatuhan*. Hal 13-14.
- Sopannah. 2010. Menguak Fenomena Penolakan Pembangunan dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Sebuah Studi Interpretif. SNA XIII. Purwokerto.
- Susetiawan. 2009. Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Sebuah Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Neoliberalisme. *Working Paper*. Yogyakarta.
- Sidik, M. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Bandung.

- Sulistyowati, F. MC., Candra R. D. dan Harisaptaning T. 2017. Pelembagaan Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Implementasi Sistem Informasi Desa. *Jurnal APISKOM*. Vol. 3, No 2. 215-224.
- Subroto, A. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Thesis*. Semarang.
- Sidik, M. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Bandung.
- Santosa, P. 2008. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung
- Tayibnapi, F. Y. 2000. Evaluasi program. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Taufik, T. 2013. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi*
- Yuliana, M. 2013. Desa Kini dan Masa Depan dalam Sudut Pandang Sisi Dilematis Undang-Undang Desa. *Available* at <https://www.academia.edu>.
- Yunianti, Umi. 2015. Analisis Efesiensidan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). *Thesis*. Yogyakarta.



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



RIWAYAT HIDUP

Reski Amalia Putri, lahir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 18 Februari 1996. Adapun perjalanan pendidikan awal di SD INPRES Batang Kaluku, Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di MTs Mannilingi Bulu-Bulu di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2008-2010. Dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMKN 1 Jeneponto tahun 2010-2011 dan kemudian pindah ke SMAN 1 Batang yang sekarang sudah menjadi SMA 5 Di kabupaten Jeneponto tahun lulus 2013. Dan melanjutkan perguruan tinggi salah satu universitas yang ada Di Indonesia Timur Yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) yang terletak di Kota Makassar, pada saat itu Di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) saya lulus jalur undangan atau SNMPTN saat itu saya sangat tertarik dengan akuntansi akhirnya saya melakukan pendaftaran ulang pada tahun 2013.

Pada saat masuk Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar angkatan saya yang memulai dengan Fakultas baru yang dahulunya masih berada dibawah naungan Fakultas Syariah Dan Hukum hingga akhirnya berdiri sendiri mejadi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI). Pada masa sekolah menengah pertama atau MTs Mannilingi Bulu-Bulu telah mengikuti beberapa organisasi di antaranya Pramuka dan PMR (Palang Merah Remaja) pada waktu itu saya masih menjabat sebagai anggota, kemudian setelah saya masuk di SMKN 1 Jeneponto saya mulai

menjabat OSIS, sebagai anggota OSIS pada bidang keorganisasian. Di SMAN 1 Batang saya masuk organisasi seni sikatutui saya sebagai anggota teater.

Kemudia pada saat kuliah sempat mengikuti beberapa organisasi baik ekstra maupun intra kampus UINAM diantaranya HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) pada tahun 2015 sampai 2016 tapi kurang aktif setelah pengkaderan. Setelah itu saya juga masuk organisasi intra yaitu HMJ Akuntanis (Himpunan Mahasiswa Jurusan) pada fakultas ekonomi dan bisnis islam dan menjadi anggota,. Kemudian tahun selanjutnyan menjabat lagi tapi kurang aktif dikarenakan sibuk dalam urusan akademik, termasuk pengurusan KKN (Kuliah Kerja Nyata) setelah menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan bisnis islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

